



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : 642.2/Kep. 5330 -Dikbud/2016

Tentang :

**Pemberian Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar Ar Rafi' BHS Sumedang
di bawah naungan Yayasan Bina Harapan Sumedang**

- Menimbang :
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Bina Harapan Sumedang yang beralamat di Jalan Palasari No. 59B Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang bermaksud untuk mendirikan sekolah;
 - Bahwa semua persyaratan untuk mendirikan dan pembukaan Sekolah sudah terpenuhi;
 - Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Ar Rafi' BHS Sumedang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Nomenklatur, Jumlah, Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 63 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Nomenklatur, Jumlah Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 63);

Memperhatikan : a. Akta Notaris H. Muchamad Arisandhi Bachrum, S.H. Nomor 90 Tanggal 28 April 2007 tentang Pendirian Yayasan Bina Harapan Sumedang;

b. Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-2419.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Bina Harapan Sumedang;

c. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 421.3/512/Dikbud/2015 tanggal 02 Maret 2015 perihal Surat Rekomendasi Izin Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2015/2016;

- d. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Nomor : 421/31/Kel.2015 tanggal 26 Februari 2015;
- e. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Sumedang Utara Nomor : 421/357/Kec./2015 tanggal 2 Februari 2015;
- f. Surat Rekomendasi dari UPTD PAUD PNFI TK dan SD Kecamatan Sumedang Utara Nomor : 421/059/UPTD PAUD,PNFI,TK & SD/2015 tanggal 4 Maret 2015;
- g. Surat Pernyataan Dukungan dari SD Negeri Babakanhurip Kecamatan Sumedang Utara Nomor : 421.2/019/SD-035/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016.
- h. Surat Pernyataan Dukungan dari SD Negeri Sukamaju Kecamatan Sumedang Utara Nomor : 421.2/073/SD-019/XII/2016.
- i. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Bina Harapan Sumedang tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Nomor : 800/31/07/YBHS/2016 tanggal 16 Juli 2016;
- j. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Bina Harapan Sumedang tentang Pengangkatan Guru dan Pegawai Nomor : 800/32/07/YBHS/2016 tanggal 16 Juli 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Bina Harapan Sumedang
 Nama Sekolah : SD AR RAFI' BHS Sumedang
 Akta Notaris : H. Muchamad Arisandhi Bachrum, S.H.
 Nomor 90 Tanggal 28 April 2007
 Alamat : Jl. Prabu Tadjimalela No. 68 RT. 04/13 Kel. Kotakaler
 Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang

KEDUA

- : Sekolah Dasar sebagaimana tersebut pada diktum pertama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumedang
 Pada tanggal : 21 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN SUMEDANG,



Drs. H. SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19660516 198609 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
3. Yth. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
5. Yth. Asisten Daerah Bidang Pembagunan;
6. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sumedang.